

PERAN DAN FUNGSI PERPUSTAKAAN NASIONAL DI IBU KOTA NEGARA BARU KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Irhamni dan Vira Farhana

Perpustakaan Nasional RI

Email: irhamni@perpusnas.go.id, virafarhana@perpusnas.go.id

Abstrak

Pendahuluan. Keputusan Pemerintah Republik Indonesia untuk memindahkan lokasi ibu kota baru dari Jakarta ke Kalimantan. Pemindahan ibukota juga pernah dilaksanakan di sejumlah daerah antara lain Jepang yang memindahkan ibukotanya dari Kyoto ke Tokyo dan Amerika Serikat dari Pennsylvania ke Washington DC. Pemindahan ini tentu akan berakibat pada peran fungsi Perpustakaan Nasional karena akan banyak perubahan yang signifikan dari segi demografis penduduk dan lain sebagainya.

Tujuan. Tulisan ini akan mencoba melihat bagaimana peran dan fungsi perpustakaan nasional di ibu kota negara baru kesatuan Republik Indonesia dengan melihat bagaimana peran perpustakaan nasional di Amerika Serikat dan Jepang.

Metode. Data dalam penelitian ini diambil dengan melalui kajian studi, wawancara serta forum grup diskusi yang diadakan di Perpustakaan Diet Jepang serta Library of Congress di Washington DC, sementara itu pengolahan data pada hanya mencakup pada analisis deskriptif terkait bagaimana peran dan fungsi perpustakaan nasional pada negara yang pernah mengalami pemindahan Ibukota di dunia.

Hasil dan pembahasan. Perpustakaan Nasional di Ibu Kota baru perlu mereposisi menjadi pusat referensi dan deposit untuk penelitian dan kajian untuk pengambil kebijakan negara. Sejumlah tantangan yang akan dihadapi adalah perubahan perilaku pemustaka serta memperkuat posisi perpustakaan nasional sebagai simpul rujukan penelitian di Indonesia.

Kata Kunci: Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

Abstract

Introduction. The Government of Indonesia has decided to move the capital city from Jakarta to Kalimantan. Some countries have ever moved their capital city like Japan which moved its capital from Kyoto to Tokyo and the United States from Pennsylvania to Washington DC. This move will certainly have an impact on the role of the function of the National Library because there will be many significant changes in terms of population demographics, etc.

Purpose. This paper was mainly written to see how the role and function of the national library in the new national capital of the Republic of Indonesia by looking at the role of national libraries in the United States and Japan.

Method. The data in this study were taken through literature study, interviews and discussion forum held at the Japanese Diet Library and the Library of Congress in Washington DC. Meanwhile, the data processing only included descriptive analysis related to how the role and function of national libraries in the countries ever experiencing the relocation of their capital.

Result and discussion. The National Library in the new capital city needs to be repositioned as a reference and deposit center for research and studies for state policy makers. A number of challenges that will be faced are changes in the behavior of users and the strength of the position of the national library as a research reference center in Indonesia.

Keywords: National Library, National Library of Indonesia

Pendahuluan

Wacana pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia terus bergulir, Mulai dari era presiden Soekarno di tahun 1960-an, Era Soeharto di Tahun 80-an, dan sempat di singgung di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Tahun 2012 namun baru di mantapkan oleh Presiden Joko Widodo di tahun 2019 dengan memilih wilayah Penajam Paser Kalimantan Timur sebagai Ibu kota baru Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ibu Kota baru Negara Kesatuan republic Indonesia saat ini yaitu Jakarta dirasa sudah tidak bisa menampung segala aktifitas pemerintahan dimana segala permasalahan Ibu kota tidak bisa diselesaikan. Solusi yang ditawarkan adalah memindahkan lukota dan Pusat pemerintahan ke luar pulau jawa. Pemindahan Ibu kota dilakukan untuk memberikan pemerataan ekonomi agar tidak jawa sentris dan memudahkan pemerintah focus pada administrasi pemerintah di suatu wilayah NKRI.

Perpustakaan Nasional sebagai Lembaga pemerintah non kementerian yang berada langsung di bawah presiden sebagaimana di amanatkan dalam UU nomer 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan pasa... dimana Perpustakaan berkedudukan di Ibukota negara. Hal ini berdampak langsung terhadap kedudukan dan fungsi perpustakaan nasional itu sendiri dimana menurut UU No,43 tentang perpustakaan menyatakan perpustakaan nasional merupakan Lembaga pemerintah non kementerian yang bertanggung jawab terkait urusan perpustakaan di Indonesia. Perpustakaan Nasional RI sebagai sebuah wahana pembelajaran sepanjang hayat mempunyai posisi strategis sebagai tempat bukan hanya sebagai penyimpan informasi suatu bangsa namun juga sebagai tempat untuk melakukan berbagai macam aktivitas dalam menunjang kemajuan bangsa dalam berbagai macam aspek. Peran perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang telah di tetapkan melalui UU No.43 Tahun 2007 tentang perpustakaan menjadi sangat penting di Ibu Kota negara Kesatuan republik Indonesia. Untuk itu Perpustakaan Nasional harus merumuskan tentang bagaimana konsep perpustakaan nasional di Ibu Kota negara Kesatuan Republik ndonesia yang baru. Sejumlah negara yang bisa dijadikan rujukan dalam pengembangan tugas pokok dan fungsi perpustakaan Nasional yang berada khusus di Ibu Kota adalah Jepang yaitu National Diet Library serta Amerika Serikat yaitu *Library of Congress*. Tulisan ini akan sedikit membahas mengenai

konsep perpustakaan nasional RI di Ibu Kota baru negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kajian Pustaka

1. Konsep Baru Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pemerintah telah mengumumkan lokasi ibu kota baru akan berada di wilayah Kalimantan Timur (Kaltim). Tepatnya, lokasi ibu kota baru berada di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara. Presiden Joko Widodo mengumumkan lokasi ibu kota baru itu dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Pemilihan lokasi ibu kota baru telah melewati studi selama 3 tahun, pemilihan ditetapkan berdasarkan pertama karena daerah tersebut minim risiko bencana banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, gunung api dan tanah longsor. "Kedua, lokasinya yang strategis, berada di tengah-tengah Indonesia, ketiga, berdekatan dengan wilayah perkotaan yang sudah berkembang, yaitu Balikpapan dan Samarinda. Yang keempat, telah memiliki infrastruktur yang relatif lengkap, kelima, telah tersedia lahan yang dikuasai pemerintah seluas 180.000 hektare (Idham, 2019).

Konsep Awal Desain Ibu Kota Baru Pemerintah menargetkan pembangunan ibu kota di Kaltim dimulai pada 2020, dan paling lambat, pusat pemerintahan sudah berpindah dari Jakarta di tahun 2024. Memasuki Tahun 2020 sejumlah fase persiapan akan dilakukan finalisasi persiapan dari masterplan-nya, urban design-nya, building design-nya, desain bangunannya, sampai dasar perundang-undangannya. Saat ini Pemerintah telah menyiapkan lahan seluas 200 ribu hektare dan siap dihuni untuk 1,5 juta penduduk. Sejumlah infrastruktur yang akan dibangun dengan kawasan induk ibu kota baru menempati lahan seluas 40 ribu hektare dan ke depan akan diperluas hingga 180 ribu hektare. Lahan tersebut itu separuhnya nanti adalah ruang terbuka hijau termasuk hutan lindung.

Gagasan Rencana dan Kriteria Desain Ibu Kota Negara (IKN)' beredar. Dokumen tersebut berisi desain dari Ibu Kota Negara yang baru dan berlogo resmi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Dalam konsep gagasan desain ibu kota tersebut, pembangunan ibu kota baru disesuaikan dengan identitas bangsa yakni Pancasila. Unsur perisai di Pancasila dengan 5 sila jadi pusat kota yang membagi kota menjadi 5 lajur/simpang. Pusatnya terdapat Monumen Pancasila, mirip dengan

Monumen Nasional namun dengan dasar bintang segilima. Konsep kota yang dibangun adalah kota modern yang compact dan inklusif. Tata ruang sangat berorientasi dengan lingkungan (ruang terbuka hijau) dan sosial masyarakat. Tak lupa infrastruktur kota juga saling terintegrasi dengan transportasi publik. Kota juga dibangun dengan koneksi teknologi informasi. Ibu kota yang baru ini juga akan mengedepankan arsitektur yang sesuai dengan kearifan lokal dan arsitektur modern yang dibangun dengan material ramah lingkungan. Kota ini diharapkan mampu menyeimbangkan aspek sosial, ekonomi maupun lingkungan. Harapannya juga kota ini bisa jadi contoh dan acuan kota-kota di Indonesia pada umumnya. Ibu kota baru akan jadi kota cerdas dan berstandar internasional. Selain itu Ibu Kota baru Indonesia akan mengadopsi konsep smart city pada umumnya, pembangunan ibu kota baru akan menggunakan pendekatan-pendekatan sistem kota cerdas. Di mana infrastruktur pendukung awal seperti air bersih, sampah, maupun gedung-gedungnya akan di desain sesuai dengan konsep berkelanjutan (Kumparan, 2019).

Sebagai implementasi smart city salah satu yang akan diterapkan di dalam ibu kota baru akan menggunakan smart berbasis teknologi. Ini dibutuhkan sebagai upaya memenuhi kebutuhan para aparatur negara di daerah tersebut. salah satu kebutuhan mendasar adalah bukan hanya air bersih, sanitasi, air limbah, kemudian juga jaringan listrik, kemudian layanan administrasi apakah untuk KTP, keperluan administrasi lainnya mengurus izin sampai kepada kebutuhan terkait dengan penanggulangan bencana, ketertiban lalu lintas atau menurunkan tingkat kriminalitas jadi semua hal dasar itu harus menjadi isu yang diatasi dengan pendekatan smart berbasis teknologi. Selain itu pemenuhan dasar terhadap akses informasi seperti akses pendidikan untuk pengembangan literasi baik untuk individu maupun Lembaga. Aksesibilitas terhadap informasi dilakukan dengan pengembangan data center dan pusat penelitian yang didukung oleh aksesibilitas sumber informasi yaitu perpustakaan dan pusat data untuk mendukung pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh semua Lembaga negara baik eksekutif, legislative maupun yudikatif.

Tujuan akhir Pemandangan ibukota ke luar pulau Jawa diharapkan akan mendorong penurunan kesenjangan antar wilayah. Hal ini akan Mendorong perdagangan antar wilayah, terutama perdagangan antara pulau Jawa dengan

wilayah di luar pulau Jawa serta antar wilayah di luar pulau Jawa. Selain itu mampu mendorong investasi terutama di provinsi ibukota negara baru dan provinsi sekitarnya. Mendorong diversifikasi ekonomi, sehingga tercipta dorongan nilai tambah ekonomi pada sektor nontradisional di provinsi tersebut. Sementara itu Dampak ekonomi dari pemindahan ibukota akan lebih maksimal jika dibarengi dengan peningkatan produktivitas, inovasi dan teknologi di provinsi terpilih dan provinsi sekitarnya. Terciptanya konektivitas perdagangan antara daerah di luar pulau Jawa perlu ditingkatkan terutama antara daerah yang menjadi lokasi ibu kota negara baru dengan daerah-daerah disekitarnya bahkan ke daerah yang menjadi sasaran pemerataan pembangunan seperti kawasan Indonesia timur.

2. Konsep Perpustakaan Nasional

Sebagai organisasi yang didanai publik, perpustakaan nasional memiliki kewajiban untuk melayani public dan memberikan nilai tambah terhadap semua informasi yang dimiliki oleh perpustakaan. Untuk itu perpustakaan nasional tidak lepas dari globalisasi pengetahuan dan harus mengikuti perkembangan infrastruktur pengetahuan secara terbuka dan global. Hal tersebut perlu dibangun dengan cara yang tepat untuk memastikan transparansi dan akses terbuka ke informasi. Perpustakaan Nasional memiliki peran penting untuk memfasilitasi akses bagi mereka yang tidak dilayani oleh Lembaga informasi lain. Untuk itu perpustakaan perlu bekerja secara efektif di lingkungan yang tepat, Perpustakaan Nasional perlu secara bertahap bergeser dari mendefinisikan diri sebagai pemilik koleksi informasi yang memiliki kemampuan untuk membantu pengguna kami untuk:

- * Menemukan dan akses informasi paling cocok yang tersedia dari koleksi Perpustakaan dan konten yang relevan secara global
- * Memudahkan penggunaan informasi ini untuk membuat pengetahuan baru dan
- * Membagikan pengetahuan dengan memfasilitasi penggunaan informasi dengan cara tepat.

Berdasarkan UNESCO Fungsi Perpustakaan Nasional adalah melaksanakan fungsi pelestarian koleksi lengkap materi yang berasal dari dan berkaitan dengan negara bersangkutan. Pada beberapa negara, perpustakaan nasional merupakan alat utama yang digunakan untuk mengumpulkan secara

komprehensif semua terbitan yang terbit tentang negara tersebut (Stevens, 2016). Saat ini Beberapa negara juga mengimplementasikan undang-undang deposit sebagai dasar hukum perpustakaan Nasional di berbagai negara untuk mengumpulkan karya cetak dan karya rekam. Sebagai contoh di Norwegia, undang-undang deposit yang diluncurkan pada tahun 1989 menyatakan bahwa perpustakaan nasional harus mengumpulkan dokumen dalam segala bentuk: audiovisual, elektronik, program penyiaran dan bahan lain yang mempunyai keterkaitan dengan negara tersebut. Di Finlandia, Undang-undang deposit yang baru mencakup bahan cetakan dan bahan elektronik yang dapat diakses secara bebas dan program radio dan TV. Perpustakaan nasional berfungsi sebagai perpustakaan legal deposit dimana Perpustakaan Nasional membangun pusat penelitian dengan membangun koleksi mereka sesuai dengan profil negara mereka. Namun, ada inisiatif untuk membuat koleksi nasional yang didistribusikan ke berbagai pusat penelitian. Perpustakaan Nasional ini memusatkan akuisisi mereka dan mencoba untuk mendapatkan semua materi yang mungkin dari bidang subjek yang mereka butuhkan. Sebagai implementasi hal tersebut Perpustakaan Nasional saat ini mempunyai peran penting sebagai Pusat Repository Nasional. Fungsi utama repository nasional adalah menerima, menyimpan, dan menyediakan semua bahan diterbitkan dari semua penerbit dan lembaga yang berada di negara tersebut (Buigues-garcía, M., & Giménez-chornet, V, 2012)..

Secara garis besar perpustakaan nasional di Indonesia berdasarkan UU No 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan, Perpustakaan Nasional melakukan fungsi yang berkaitan dengan warisan khasanah budaya bangsa serta fungsi yang terkait dengan infrastruktur (atau membangun kapasitas nasional untuk perpustakaan layanan informasi) dan serta melakukan fungsi terkait dengan layanan perpustakaan nasional yang komprehensif. Perpustakaan nasional yang menekankan dimensi pertama, warisan, dalam fungsinya berhubungan erat dengan perpustakaan nasional tradisional di mana kepedulian terhadap koleksi merupakan perhatian utama. Dimensi kedua, infrastruktur, menurutnya adalah perkembangan yang lebih modern dan merupakan jantung dari perpustakaan nasional modern yang berada dalam transisi dari perpustakaan fisik ke perpustakaan digital dan berkepentingan untuk membangun kapasitas nasional dalam layanan

perpustakaan dan informasi, dan bukan sekadar dengan koleksi perpustakaan nasional sendiri. Akhirnya, perpustakaan yang memiliki orientasi layanan komprehensif nasional terutama ditemukan di negara-negara berkembang di mana perpustakaan nasional bertanggung jawab untuk memberikan layanan perpustakaan nasional kepada pengguna akhir di seluruh negara melalui jaringan penyediaan.

Brindley (2002) mengusulkan skema baru untuk perpustakaan nasional untuk abad ke-21, yang mendefinisikan peran daripada fungsi, karena mereka memposisikan ulang dan menegaskan kembali pentingnya mereka untuk era digital.

- Dukungan untuk penelitian;
- Melestarikan warisan budaya dan intelektual, menyediakan lokus untuk nasional identitas budaya;
- Dukungan untuk ekonomi pengetahuan;
- Dukungan untuk pendidikan dan pembelajaran seumur hidup;
- Dukungan untuk pengembangan masyarakat;
- Dukungan untuk warga negara dan
- Kepemimpinan untuk sistem perpustakaan.

Era baru perpustakaan nasional saat ini banyak dilakukan melalui persiapan yang lebih bersifat perubahan strategis yang disebut 'semuanya Tersedia' dimana layanan tersebut menjadi ekstensifikasi layanan penelitian dan merubah perspektif layanan menjadi peneliti dan organisasi penelitian. Proses ini dilakukan oleh pengembangan strategi layanan untuk mencapai perubahan perspektif dari hanya sekedar penyimpanan menjadi pusat penelitian isi dan konten. Perubahan persepektif layanan tersebut muncul didasarkan pada paradox informasi dimana banyak dan mudahnya informasi dapat ditemukan, namun isi dan relevansi kontennya banyak diragukan. Hal ini merupakan satu tantangan perpustakaan untuk menawarkan layanan perpustakaan penelitian dan berkontribusi pada lingkungan pengetahuan global yang berkelanjutan dan terbuka. Perpustakaan nasional harus mampu menyediakan bahan tanpa batas dan akses ke pengetahuan dunia, terlepas dari format untuk membantu pengguna dalam mengekstraksi informasi yang berguna dari konten. Saat ini sejumlah format dan konten telah mengalami pergeseran dari model pendekatan akses lokal ke pendekatan universal baik dari standar, format untuk meningkatkan akses pemustaka ke bahan penelitian. Untuk

menciptakan lingkungan perpustakaan nasional yang mampu menyediakan bahan penilitan yang handal dalam membantu organisasi lain dalam membuka konten mereka untuk penelitian dan membantu mereka mengurangi kehilangan data dan biaya mengelola konten.

3. Konsep Perpustakaan Nasional di Ibu Kota

3.1 Jepang

Perpustakaan nasional Jepang atau *National Diet Library* (NDL) terletak di distrik Nagato-Chon sebuah distrik dimana semua Lembaga negara berkantor. Distrik ini merupakan distrik khusus bagi semua kantor pemerintahan berkantor, jika disamakan sama persis dengan Washington DC atau Brasilia yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan di Jepang. Bangunan Utama NDL memiliki sistem tumpukan terpusat. Unit ruang tumpukan adalah 45m x 45m dan memiliki 17 level vertikal. Total kapasitas tumpukan adalah 4,5 juta volume, dengan lebar tumpukan bertambah hingga 172 km. Untuk pergerakan material yang cepat, ruang stack dilengkapi dengan pipa pembawa pneumatik dan sistem konveyor vertikal / horizontal. Unit ruang administrasi persegi mengelilingi unit ruang tumpukan persegi. Berukuran 90m x 90m dan naik setinggi enam lantai, unit ini berisi ruang katalog, ruang baca untuk pengunjung umum, ruang baca dan ruang penelitian untuk Anggota Diet, dan kantor administrasi perpustakaan. Total luas lantai unit ruang tumpukan dan unit ruang administrasi adalah 74.900 meter persegi. NDL mempunyai Visi dan Misi ditetapkan oleh Undang-Undang NDL adalah *"NDL dengan ini didirikan sebagai hasil dari keyakinan yang kuat bahwa kebenaran membuat kita bebas dan dengan tujuan berkontribusi pada perdamaian internasional dan demokratisasi Jepang seperti yang dijanjikan dalam Konstitusi kita."* (Dari *Pembukaan Hukum Perpustakaan Diet Nasional*). Misi NDL adalah menjadi Perpustakaan akan mengumpulkan buku-buku dan bahan-bahan perpustakaan lainnya untuk tujuan membantu anggota Diet Nasional dalam melaksanakan tugas mereka dan juga untuk peran menyediakan layanan perpustakaan tertentu seperti yang selanjutnya ditentukan untuk badan eksekutif dan yudisial dari pemerintah nasional dan untuk rakyat Jepang. (NLD, 2019). Sementara itu Tugas pokok dan fungsi NDL dititik beratkan dengan tiga peran dasar berikut.

- Dukungan untuk Diet
- Akuisisi dan pelestarian bahan dan informasi
- Memberi publik akses ke sumber daya informasi

Saat ini Perpustakaan Diet Nasional (NDL) telah berusia 70 tahun dan sangat menyadari bahwa empat tahun dari 2017 hingga 2020 akan berfungsi sebagai fondasi bagi pengembangan jangka panjang masa depan kami selama masa menjelang peringatan 100 tahun kami. Berdasarkan kesadaran ini, NDL telah merumuskan Visi Jangka Menengah baru untuk mencapai misi kami, seperti yang dijelaskan dalam pembukaan Undang-Undang NDL.

Visi Jangka Menengah ini menekankan kemajuan tiga peran dasar - Dukungan untuk Diet, Akuisisi dan pelestarian bahan dan informasi, dan Menyediakan akses publik ke sumber daya informasi - dari perspektif komprehensif yang mencakup kebutuhan yang berkembang di masa itu. Ini juga menjelaskan empat konsep utama yang akan memandu upaya kami untuk memenuhi peran dasar ini: Lingkungan untuk pelanggan, kekuatan organisasi, Kolaborasi, dan penyebaran informasi. Kami telah menamai Visi Jangka Menengah baru ini *"Akses Universal 2020,"* dengan keyakinan bahwa memenuhi peran dasar kami melalui konsep-konsep kunci ini akan memberi para pelanggan kami akses ke informasi yang sesuai dengan kebutuhan mereka, baik saat ini dan di masa depan, serta berkontribusi pada penciptaan masa depan yang makmur. Selain itu, NDL telah merumuskan dan berkomitmen untuk mencapai sasaran pencapaian jangka menengah yang ditunjukkan dalam tiga peran dasar yang tercantum dalam *Universal Access 2020*.

3.2 Amerika Serikat

Buku dan perpustakaan sangat penting bagi generasi pendiri Amerika. Sebagian besar pendiri menerima pendidikan klasik yang penuh semangat. Maka, selanjutnya, bahwa sebagian besar anggota Kongres AS yang baru, yang bertemu pertama kali di New York dan kemudian di Philadelphia, juga pembaca yang rajin. Di kedua kota, Kongres memiliki akses ke perpustakaan yang cukup besar: Perpustakaan *New York Society* dan Perpustakaan Philadelphia. Pada tahun 1800, sebagai bagian dari tindakan Kongres yang mengatur pemindahan pemerintah nasional yang baru dari Philadelphia ke Washington, Presiden John Adams menyetujui tindakan Kongres yang menyediakan \$ 5.000

untuk buku-buku untuk penggunaan Kongres — awal dari Perpustakaan Kongres. Komite Kongres Gabungan — komite gabungan pertama — akan memberikan pengawasan. Pada 1802, Presiden Thomas Jefferson menyetujui kompromi legislatif yang menjadikan tugas Pustakawan Kongres sebagai penunjukan presiden, yang memberi Perpustakaan Kongres hubungan yang unik dengan Kepresidenan Amerika. Jefferson menunjuk dua Pustakawan Kongres yang pertama, yang masing-masing juga menjabat sebagai juru tulis Dewan Perwakilan Rakyat.

Pada 1814, Inggris membakar Washington, menghancurkan Capitol dan perpustakaan kongres kecil di sayap utara. Kongres menerima tawaran Jefferson untuk menjual perpustakaan pribadinya yang lengkap dengan 6.487 buku untuk “memulai kembali” perpustakaannya sendiri. Konsep universalitas Jefferson adalah alasan untuk kebijakan pengumpulan komprehensif *Library of Congress* hari ini. Selain itu, keyakinan Jefferson pada kekuatan pengetahuan dan hubungan langsung antara pengetahuan dan demokrasi telah membentuk filosofi Perpustakaan untuk berbagi koleksi dan layanannya yang kaya dan seringkali unik, seluas mungkin. Melihat dari perspektif hari ini, jelas bahwa Perpustakaan memainkan peran legislatif, nasional, dan internasional yang penting. Namun, tidak jelas selama dasawarsa awal Perpustakaan di Capitol A.S. bahwa itu akan berkembang menjadi lebih dari lembaga legislatif, peran yang disukai oleh Komite Perpustakaan Bersama. Selain itu, itu terganggu oleh kebakaran, kekurangan ruang, kekurangan staf dan kurangnya alokasi tahunan. Meskipun itu membuat literatur populer tersedia untuk masyarakat umum, tujuan utama Perpustakaan adalah untuk melayani Kongres (Deluca, 2019).

Perpustakaan kongres merupakan perpustakaan yang melaksanakan perpustakaan nasional dengan fungsi melaksanakan fungsi deposit dan Perpustakaan Kongres juga menjadi pusat informasi untuk Lembaga penelitian Kongres, dimana membantu kongres AS dalam perumusan kebijakan secara legislative. Seperti kebanyakan lembaga pemerintah, Lembaga penelitian kongres merupakan lembaga yang memiliki budaya kuat dalam penelitian kebijakan dimana kolaborasi menjadi hal yang penting dalam menghasilkan suatu kebijakan bagi masyarakat. Lembaga ini bahu membahu dengan Perpustakaan Kongres dimana Perpustakaan Kongres membantu menjelajahi subjek di mana bantuan

Perpustakaan Kongres dilibatkan, Sementara staf lembaga penelitian akan melakukan analisis beberapa topik penelitian berdasarkan informasi yang didapatkan oleh pustakawan kongres (Relyea, 2012). Dalam melakukan penelitian untuk mengeluarkan kebijakan dibentuk komite bersama antara perpustakaan untuk memberikan dan mengarahkan bahan-bahan yang digunakan untuk penelitian. Hasil penelitian tersebut akan dibahas melalui siding di kongres dan melibatkan pustakawan dan Lembaga penelitian kongres dan dan resolusi diperkenalkan dalam sesi persidangan Kongres dan hasil riset tersebut diterbitkan dalam dua kumulatif melalui laporan penelitian kongres.

Metode Penelitian

1. Pengambilan data

Data dalam penelitian ini diambil dengan melalui kajian studi, wawancara serta forum grup diskusi yang diadakan di Perpustakaan Diet Jepang serta Library of Congress di Washington DC. Selain itu Data diperoleh dan digunakan adalah berupa jurnal lokal dan internasional terkait bagaimana peran perpustakaan nasional. Selain itu digunakan juga dokumen perencanaan, petunjuk teknis/pedoman teknis, laporan-laporan, dan dokumen lain yang terkait wacana pemindahan Ibukota baru NKRI.

2. Pengolahan data

Ruang lingkup pengolahan data pada hanya mencakup pada analisis deskriptif terkait bagaimanaperan dan fungsi perpustakaan nasional pada negara yang pernah mengalami pemindahan Ibukota di dunia. Data dianalisis dengan memberikan deskripsi dan melihat perbandingan bagaimana peran dan fungsi perpustakaan nasional tersebut di Ibukota negara yang baru.

Hasil dan Pembahasan

1. Konsep Perpustakaan Nasional RI di Ibu Kota Baru

Undang-undang No.43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan menegaskan bahwa Perpustakaan Nasional merupakan LPND yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan dan berkedudukan di ibukota negara. Terkait pemindahan Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia Perpustakaan Nasional RI akan menyusun sejumlah konsep dan kebijakan mengenai perpustakaan nasional di Ibu kota negara kesatuan Republik Indonesia.

Perpustakaan Nasional RI di Ibu kota baru tetap akan mengusung Perpustakaan Nasional sesuai UU No.43 tahun 2007 tentang perpustakaan dimana Perpustakaan Nasional RI bertugas : a. menetapkan kebijakan nasional, kebijakan umum, dan kebijakan teknis pengelolaan perpustakaan; b. melaksanakan pembinaan, pengembangan, evaluasi, dan koordinasi terhadap pengelolaan perpustakaan; c. membina kerja sama dalam pengelolaan berbagai jenis perpustakaan; dan d. mengembangkan standar nasional perpustakaan. Pemerintah menargetkan pembangunan ibu kota di Kaltim dimulai pada 2020, dan paling lambat, pusat pemerintahan sudah berpindah dari Jakarta di tahun 2024. Ibu Kota baru juga akan berkensep Green City Ibu Kota Baru di Kalimantan Timur dengan Total waktu konstruksi diperkirakan 3-4 tahun untuk penetapan desain ibu kota baru yang berstandar internasional. Untuk mewujudkan kota cerdas dan modern berstandar internasional dan menjadikan ikon urban design sebagai representasi kemajuan bangsa yang unggul. Untuk mewujudkan hal tersebut Perpustakaan nasional RI mempunyai peran penting karena tugas pokok dan fungsinya sebagai pusat penelitian, preservasi, Pendidikan, Deposit, Informatif dan Rekreatif.

Perpustakaan Nasional di Ibu kota baru perlu memikirkan strategi dalam perannya sebagai perpustakaan yang menampung seluruh khasanah intelektual bangsa Indonesia dan juga melayani public dalam pelayanan perpustakaan serta pusat pembinaan berbagai jenis perpustakaan di Indonesia. Akan ada banyak perbedaan antara Jakarta Ibu kota lama NKRI dengan Ibu Kota NKRI yang baru. Ibu kota NKRI yang dirancang hanya untuk pusat pemerintahan dan administrasi dan hal ini akan membuat ibu kota baru NKRI menjadi lebih homogen dibanding dengan Jakarta yang sangat heterogen dan majemuk. Jakarta mempunyai lebih dari 10 juta jiwa dengan tingkat keaktifan komuter yang sangat tinggi, jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Ibu Kota NKRI yang baru nanti, jumlah penduduk kemungkinan hanya akan 2 juta jiwa

dan akan di dominasi oleh ASN (Aparatur Sipil Negara) dengan tingkat komuter yang sangat jauh dari Jakarta karena infrastuktur untuk melakukan komuter akan sangat terbatas.

Sebagai layanan public Perpustakaan Nasional perlu merancang sebuah formula baru yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan dimana perpustakaan nasional berada. Kondisi demografi Ibu kota baru NKRI yang homogen dimana hanya didominasi oleh ASN membuat Perpustakaan Nasional RI perlu merancang sebuah perpustakaan yang mampu mengakomodasi kepentingan pemustakanya. Perubahan yang harus dilakukan adalah melakukan perubahan pola pelayanan dengan mengembangkan layanan manajemen koleksi yang terintegrasi baik koleksi manual maupun digital. Untuk itu perpustakaan Nasional harus melakukan pengumpulan koleksi fisik dengan pendekatan kolaboratif melalui kemitraan antara sector swasta dalam hal ini penerbit, pendidikan tinggi dan Lembaga pemerintahan dan pendekatan serupa dapat dipertimbangkan dalam lingkungan digital. Sebagai pelaku utama undang-undang Deposit yaitu UU No.13 tahun 2018 Perpustakaan Nasional RI adalah Lembaga yang tepat sebagai Lembaga yang menjalankan fungsi repositori semua bahan perpustakaan yang terbit di Indonesia untuk menunjang fungsi penelitian untuk kebijakan dan pengambilan keputusan oleh Kementerian/Lembaga negara di Ibu Kota baru. Implementasi Peraturan Kepala (Perka) Perpustakaan Nasional Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian International Standard Book Number (ISBN) cukup membantu meningkatkan kepatuhan penerbit untuk melaksanakan kewajiban serah simpan KCKR ke Perpustakaan Nasional. Dalam Perka tersebut memuat pasal yang mengaur mengenai pemblokiran ISBN bagi penerbit yang belum melaksanakan kewajiban serah simpan KCKR. Pemblokiran ini merupakan bagian dari pembinaan Perpustakaan Nasional terhadap penerbit. Kebijakan tersebut sangat mempengaruhi tingkat implementasi kewajiban SS KCKR, dengan hasil sebagai berikut :

URAIAN	2015		2016		2017		2018		2019		TOTAL	
	Judul	Eksemplar	Judul	Eksemplar	Judul	Eksemplar	Judul	Eksemplar	Judul	Eksemplar	Judul	Eksemplar
Karya Cetak	27.080	43.583	24.216	61.423	67.114	125.870	45.966	110.734	57.839	130.016	301.828	1.057.895
Karya Rekam	551	587	99	137	298	368	22.770	31.829	266.182	266.182	21.729	26.803
Terbitan Internasional & regional	424	447	990	1125	460	570	88	97	0	0	26.814	55.548
TOTAL	28.055	44.617	25.305	62.685	67.872	126.808	68.824	142.660	324.021	396.198	350.371	1.140.246

Berdasarkan tabel di atas, Saat ini Implementasi simpan KCKR sejak 2015 hingga 2019 selalu mencapai bahkan melampaui target. Melihat kondisi capaian hingga di tahun keempat Renstra Perpustakaan Nasional 2015-2019, Direktorat Depositi Bahan Pustaka sebagai pelaksana UU No.13 tahun 2018 tentang Wajib Serah Sumpun KCKR sampai dengan 2019 telah berhasil mengumpulkan KCKR dengan jumlah ebanyak 396.198 Eksemplar dengan total perolehan selama lima tahun sejumlah 1.140.246 Eksemplar (Perpusnas,2019).

Hal ini menjadi potensi baru bagi perpustakaan nasional di Ibukota baru untuk bisa mendayagunakan hasil implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak Karya Rekam. Undang-Undang ini harus mampu memberikan jawaban tantangan seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang ditandai dengan digitalisasi era revolusi industri 4.0 serta sebagai tanggung jawab pembukaan UUD 1945 dalam rangka mewujudkan tujuan negara untuk melindungi asset bangsa dan karya intelektual warga negara Indonesia. Selain meningkatkan peningkatan kuantitas jumlah koleksi, Perpustakaan nasional juga perlu mengembangkan metode peningkatan akses terhadap Koleksi yang dimilikinya. Peningkatan akses dapat dilakukan dengan melakukan penerjemahan besar-besaran terhadap koleksi bahan perpustakaan tentang Indonesia yang berada di luar negeri yang dimiliki oleh Perpustakaan Nasional. Selain itu eningkatan akses juga bisa dilakukan juga dengan mengembangkan layanan akses jarak jauh untuk menjadi sumber yang tepercaya dan sangat diperlukan untuk pencarian fakta, penelitian, dan analisis untuk para pengambil kebijakan di Ibu Kota NKRI di mana pun.

2. Tantangan dan Masalah Perpustakaan Nasional RI di Ibu Kota Baru.

Tantangan yang akan dihadapi oleh perpustakaan Nasional di Ibukota yang baru adalah selain akses dan infrastruktur, Perpustakaan Nasional ditantang untuk melakukan sejumlah perubahan pola fikir atau mindset mengenai kebijakan internal terkait ukuran dan keragaman koleksi. Saat ini pertumbuhan koleksi perpustakaan akan lebih banyak di dominasi oleh pertumbuhan koleksi digital dimana koleksi ini akan tumbuh secara eksponensial. Karena banyaknya informasi, tidak lagi cukup untuk

mengarahkan peneliti pada objek tetapi untuk mengidentifikasi informasi yang terkandung di dalamnya dan untuk memahami hubungan antara objek. pengembangan koleksi perpustakaan nasional harus diselaraskan dengan kebutuhan dengan potensi pemustaka perpustakaan nasional. Ibukota NKRI yang baru hampir kemungkinan akan dihuni oleh para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mempunyai kebutuhan yang agak sedikit homogen disbanding dengan Ibukota ketika masih berada di Jakarta, mengantisipasi hal tersebut Perpustakaan Nasional perlu melakukan asesmen terhadap kebutuhan koleksi yang akan dibutuhkan oleh calon pemustakanya di Ibukota baru nanti.

Perubahan pola perilaku pengguna menjadi tantangan yang sangat berat untuk diterka jika masih menggunakan metode lama dalam melakukan pengadaan koleksi. Perubahan perilaku pemustaka sangat berkaitan erat dengan perkembangan teknologi yang terjadi di perpustakaan dengan berkembangnya perpustakaan digital. Perpustakaan digital bukan hanya meletakkansejumlah koleksi digital melalui sistem informasi, Perpustakaan digital juga merupakan serangkaian kegiatan yang menyatukan koleksi, layanan dan orang-orang dalam mendukung proses bisnis perpustakaan mulai pengadaan koleksi, penyebaran, penggunaan dan penyajian informasi dan pengetahuan. Perpustakaan Nasional sebagai pusat informasi yang menyediakan berbagai jenis sumber daya dan layanan informasi. perpustakaan nasional ditantang untuk menciptakan Konten dan layanan informasi berubah seiring dengan perjalanan waktu. Internet jaringan global telah melahirkan dimensi baru bagi perpustakaan dunia digital modern. Di Ibukota baru perpustakaan nasinal harus dilengkapi dengan sistem jaringan digital dan infrastruktur komunikasi menyediakan platform global dimana setiap orang dalam organisasi mampu menyusun strategi, berinteraksi, berkomunikasi, berkolaborasi, dan mencari informasi. Penciptaan flatform ini mencakup, serangkaian besar produk digital yang merupakan basis data, berita dan informasi, buku, majalah, program TV dan radio, film, permainan elektronik, CD musik dan perangkat lunak yang terintegrasi dengan sistem perpustakaan yang ada di kementerian Lembaga yang berada di Ibukota baru nanti (CLIR, 2001).

Perpustakaan nasional di Ibukota baru juga perlu melakukan reposisi dari segi yuridis dimana perpustakaan nasional meningkatkan posisinya

dari segi legal formal. UU No.13 tahun 2018 dan UU No.43 tahun 2007 tentang perpustakaan menegaskan peran fungsi perpustakaan menjadi repositori dan Pembina. Perpustakaan nasional perlu menajamkan peran fungsi sebagai pusat penelitian dengan mengandeng Lembaga seperti LIPI dan BRIN sebagai pusat penelitian untuk menghasilkan penelitian sebagai masukan bagi pemerintah dalam pengambilan keputusan. Rencana Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) untuk mengintegrasikan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) ke dalam lembaga tunggal Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang akan dilaksanakan adalah peluang kuat bagi perpustakaan nasional untuk berkolaborasi dalam pengintegrasian seluruh hasil koleksi sebagai amanat UU No.13 tahun 2018 tentang wajib simpan serah simpan Karya Cetak Karya rekam dan juga sebagai pusat repositori riset nasional. Hal ini menjadi penting karena Perpustakaan nasional bisa menjadi penengah antara integrasi riset dari hulu (riset dasar) sampai menjadi inovasi, sampai kepada komersialisasi produk. Pengintegrasian ini juga bertujuan untuk mencegah duplikasi hasil penelitian sehingga lembaga penelitian di lingkup pemerintahan dapat melihat penelitian mana yang sudah dilakukan melalui implementasi e-repository di Perpustakaan nasional.

Kesimpulan

Keputusan Pemerintah Republik Indonesia untuk memindahkan lokasi ibu kota baru dari Jakarta yang berada di Pulau Jawa menjadi di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara yang berada di Kalimantan. Lokasi yang berada di tengah-tengah Indonesia dengan kondisi geografis yang jauh berbeda dan komposisi masyarakat yang akan jauh berbeda dari sebelumnya. Pemerintah telah menyiapkan lahan seluas 200 ribu hektare dan siap dihuni untuk 1,5 juta penduduk. Kondisi sosiologis Ibu kota baru yang akan dihuni oleh ASN tentu akan membawa

banyak perubahan signifikan bagi layanan publik di Indonesia. Pemindahan ibukota juga pernah di laksanakan di sejumlah daerah antara lain Jepang yang memindahkan ibukotanya dari Kyoto ke Tokyo dan Amerika Serikat dari Pennsylvania ke Washington DC. Akibat dari pemindahan Ibukota ini sejumlah layanan pemerintahan mempunyai banyak perubahan. Salah satu Lembaga yang berubah adalah Perpustakaan Nasional dimana bukan hanya menjalankan fungsinya sebagai deposit namun juga menjalankan pusat sebagai *Think Tank* yang menghasilkan banyak kebijakan bagi para pengambil keputusan di level atas pemerintahan.

Perpustakaan Nasional RI sebagai Lembaga negara yang mempunyai peran dan fungsi sebagai perpustakaan deposit, rujukan, penelitian, pembinaan dan rekreatif perlu secara bertahap bergeser dari mendefinisikan diri sebagai perpustakaan yang mempunyai kemampuan untuk membantu pemustaka untuk memberikan akses informasi tersedia dari koleksi Perpustakaan dan konten yang relevan secara global serta mampu memudahkan penggunaan informasi ini untuk membuat pengetahuan baru dan membagikan pengetahuan dengan memfasilitasi penggunaan informasi dengan cara tepat. Perpustakaan Nasional ditantang untuk melihat perubahan pola perilaku pengguna dengan mengadopsi perkembangan teknologi. Implementasi perpustakaan digital sebagai pintu gerbang akses koleksiharus dimaksimalkan melalui sistem pengadaan koleksi, penyebaran, penggunaan dan penyajian informasi dan pengetahuan. Perpustakaan Nasional juga perlu mereposisi posisinya melalui implementasi UU No.13 Tahun 2018 tentang wajib serah simpan karya cetak dan karya rekam dengan penajaman peran fungsi sebagai pusat simpul penelitian dengan mengandeng Lembaga seperti LIPI dan BRIN sebagai pusat penelitian untuk menghasilkan penelitian sebagai masukan bagi pemerintah dalam pengambilan keputusan.

Daftar Pustaka

Brindley L .(2002). The role of national libraries in the twenty-first century. *Bodleian Library Record* 17 (6): 464–481.

Buigues-garcía, M., & Giménez-chornet, V. (2012). International Journal of Information Management Impact of Web 2 . 0 on national libraries. *International Journal of Information Management*, 32(1), 3–10. <http://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2011.06.007>

- CLIR. (2001). Building and Sustaining Digital Collections : Models for Libraries and Museums. Council on Library and Information Resources.
- Deluca, L. (2019). Searching FOIA Libraries for government information. *Government Information Quarterly*, (September), 101417. <http://doi.org/10.1016/j.giq.2019.101417>
- Griffith, J. C. (1991). The Development of Information Technology in the Congressional Research Service of the Library of Congress. *Government Information Quarterly*, 8(3), 293–307.
- Gude, G. (1970). Congressional Research Service : The Research and Information Arm of Congress. *Government Information Quarterly*, 2(1), 5–11.
- Himawan. (2019). LIPI Bakal Diintegrasikan ke BRIN, Ini Alasan Menristek. *Kompas*. <https://regional.kompas.com/read/2019/11/01/06495841/lipi-bakal-diintegrasikan-ke-brin-ini-alasan-menristek>.
- Humphreys KN (1966). National library functions. *UNESCO Bulletin for Libraries* 20 (4): 158–169.
- Idham, Addi M. (2019). Konsep Ibu Kota Baru. *Tirto*. <http://tirto.id/rencana-desain-ibu-kota-baru-di-kaltim-luas-konsep-tata-ruang-ehcP>.
- Kim, Chin. (1969) . A New National Library: The National Diet Library of Japan. *The Journal of Library History* (1966-1972) Vol. 4, No. 3 (Jul., 1969), pp. 225-238
- Kumparan. (2019). 5 Fakta Nagara Rimba Nusa Juara Desain Ibu Kota negara yang Baru. <https://kumparan.com/berita-heboh/5-fakta-nagara-rimba-nusa-juara-desain-ibu-kota-negara-yang-baru-1sVTBIBSb04>
- Line Maurice B (1989). National Library and Information Needs: Alternative Means of Fulfilment, with Special Reference to the Role of National Libraries. Paris: UNESCO (PGI-89/WS/9).
- National Diet Library. 2019. National Diet Library Laws. <https://www.ndl.go.jp/en/aboutus/laws.html>
- Pemerintah Indonesia. 2007. Undang-Undang No. 43 Tahun 2007 Yang Mengatur Perpustakaan. Lembaran Negara RI Tahun 2007, No. 129. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. 2018. Undang-Undang No. 13 Tahun 2018 Yang Mengatur Tentang Wajib Serah Simpan Karya Cetak dan Rekam. Lembaran Negara RI Tahun 2018, No. 265. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Perpustakaan Nasional. (2019). Draft Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Jakarta: Biro Hukum dan Perencanaan Perpustakaan Nasional
- Relyea, H. C. (2012). Across the Hill : The congressional research service and providing research for congress — A retrospective on personal experience. *Government Information Quarterly*, 29(2), 275–280. <http://doi.org/10.1016/j.giq.2011.10.003>
- Relyea, H. C. (2012). Across the Hill : The congressional research service and providing research for congress — A retrospective on personal experience. *Government Information Quarterly*, 29(2), 275–280. <http://doi.org/10.1016/j.giq.2011.10.003>
- Smith, A. (2001). Strategies for Building Digitized Collections. Washington D.C.: Digital Library Federation Council on Library and Information Resources.
- Stephens, A. (2016). Functions , tasks and roles of national libraries in the 21st century. <http://doi.org/10.1177/0955749016653031>
- Tenopir, C., Sandusky, R. J., Allard, S., & Birch, B. (2014). Library & Information Science Research Research data management services in academic research libraries and perceptions of librarians. *Library and Information Science Research*, 36(2), 84–90. <http://doi.org/10.1016/j.lisr.2013.11.003>
- Vattulainen, P. (2004). National repository initiatives in Europe. *Library Collection & Technical Services*, 28, 39–50. <http://doi.org/10.1016/j.lcats.2003.11.006>